

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI ANGGARAN
KELURAHAN (AKK) DIKELURAHAN PENTADU KECAMATAN
PAGUAT KABUPATEN POHUWATO**

Oleh :

**ROHANA HAKIM
NIM : E21 19 235**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI ANGGARAN
KELURAHAN (AKK) DI KELURAHAN PENTADU
KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN
POHUWATO**

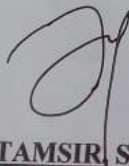
Oleh

**ROHANA HAKIM
E21.19.235**

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 08 November 2021

PEMBIMBING I



TAMSIR, SE., MM
NIDN : 0920057403

PEMBIMBING II



NG SYAMSIAH. B, SE., MM
NIDN : 0921018003

HALAMAN PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (AKK) DI KELURAHAN PENTADU KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO

Oleh

ROHANA HAKIM
E21.19.235

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo


1. Sulaiman, SE., MM :
2. Sulerski Monoarfa, S.Pd, M.Si :
3. Muhammad Anas, SE., MM :
4. Tamsir, SE., MM :
5. Ng Syamsiah. B, SE., MM :

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901

Ketua Program Studi Manajemen


Scamsul, SE., M.Si
NIDN: 0922018501

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertqwalah kepada Allah SWT supaya kamu menang”

(Q.S Ali-Imran: 200)

“Kami rela Allah membagikan ilmu untuk kami dan membagikan harta untuk musuh kami. Harta akan binasa dalam waktu singkat dan ilmu akan abadi dan tidak akan musnah”

(Ali bin AbiThalib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu dan Ayahku tercinta yang telah melahirkan, membesarkan dan tiada henti memberikan do'a dan motivasi serta selalu memberikan dukungan dalam bentuk materi.
2. Suami, yang selalu menyemangati, member dukungan serta memotivasi agar dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, dan tiada henti memberikan doa.
3. Almamater tercinta dan dosen-dosen yang telah membimbing dan mengarahkan selama penyusunan skripsi.
4. Sahabat dan rekan-rekan seangkatan yang selalu membantu dan mensuport dalam segala hal. Dan semua orang yang telah mendo'akan yang tidak dapat di sebut satu-persatu

ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPATKU MENIMBAH ILMU
2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 08 November 2021

nyataan


Rohana Hakim
E21.19.235

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato”. sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE, M.Ak., CSRS Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak H. Dr. Abdul Gaffar Latjokke, MSi, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Musafir, SE, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Syamsul, SE, M.Si, Selaku Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Ichsan Gorontalo. Bapak Tamsir, SE, MM Selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Ibu Ng Syamsiah. B, SE, MM Selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Bapak Ayub Mohi Lurah Kelurahan Pentadu, yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku dan keluarga yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada henti. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan usulan penelitian ini. Rekan-rekanku mahasiswa sebagai tempat berbagi suka dan duka selama dibangku kuliah, yang saya sebut namanya Nilda, Rawi, Selvi, Ranny, Doni, Arwin, Thika, Tina, Owin dan Ina.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 11 November 2021

(Penulis)

ABSTRACT

ROHANA HAKIM. E2119235. EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT OF URBAN VILLAGE BUDGET ALLOCATION AT PENTADU, PAGUAT SUBDISTRICT, POHUWATO DISTRICT

In managing and regulating the urban village budget allocation, the urban village apparatus must fulfill several principles, namely transparency, accountability, and participation. This study aims to find the effectiveness of the Urban Village Budget Allocation management at Pentadu, Paguat Subdistrict, Pohuwato District. Based on the result of the study, the average respondents have responses categorized as effective on "transparent" indicators, namely an average of 129. The "accountable" indicator has an average of 126 and is included in the effective category. The "participation" indicator with an average of 127 indicates the category of "effective". The effectiveness of the management of the Urban Village Budget Allocation at Pentadu, Paguat Subdistrict, Pohuwato District has been effective.

Keywords: effectiveness, management, budget allocation, urban village

ABSTRAK

ROHANA HAKIM. E2119235. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (AAK) DI KELURAHAN PENTADU KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO

Dalam mengelola dan mengatur AAK ini, perangkat kelurahan diharuskan memenuhi beberapa prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang dikategorikan efektif pada indikator transparan yaitu rata-rata sebesar 129. Indikator akuntabel memiliki rata-rata sebesar 126 dan masuk pula ke dalam kategori efektif. Indikator partisipasi dengan rata-rata sebesar 127 menunjukkan kategori efektif. Dengan demikian efektivitas pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato sudah berjalan efektif.

Kata kunci: efektivitas, pengelolaan, alokasi anggaran, kelurahan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRAK</i>	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Kelurahan.....	7
2.1.1. Konsep Kelurahan	7

2.1.2. Pembentukan Kelurahan	9
2.1.3. Tujuan Pembentukan.....	10
2.1.4. Susunan Organisasi	11
2.2. Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK)	12
2.2.1. Pengertian Pengelolaan	12
2.2.2. Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK).....	14
2.2.3. Indikator-Indikator Tingkat Pendidikan.....	16
2.3. Prinsip Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK)	16
2.3.1. Transparansi.....	16
2.3.2. Partisipasi	18
2.3.3. Akuntabilitas	20
2.4. Kerangka Pikir.....	23
2.5. Hipotesis.....	24
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	25
3.1. Objek Penelitian.....	25
3.2. Metode Penelitian	25
3.2.1. Desain Penelitian	25
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	26
3.2.3. Populasi dan Sampel	27
3.2.4. Operasional Variabel Penelitian	28
3.2.5. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30

4.1. Gambaran Umum Lokasi	30
Penelitian.....	31
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	38
5.1. Kesimpulan	38
5.2. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator Prinsip Transparan	18
Tabel 2.2. Indikator Prinsip Partisipasi	20
Tabel 2.3. Indikator Prinsip Akuntabel	23
Tabel 3.1. Tabel Operasional Variabel Penelitian	28
Tabel 4.1. Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden	32
Tabel 4.2. Tanggapan Responden Indikator Transparan	32
Tabel 4.3. Tanggapan Responden Indikator Akuntabel	34
Tabel 4.4. Tanggapan Responden Indikator Partisipasi	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kelurahan Pentadu.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Penelitian	40
<i>Lampiran 2. Kuisisioner.....</i>	41
<i>Lampiran 3 Tabulasi Data.....</i>	44
<i>Lampiran 4 Frequency.....</i>	45
<i>Lampiran 6 Output Renelitian</i>	50
<i>Lampiran7SuratKeterangan Penelitian.....</i>	52
<i>Lampiran8SuratBalasanPenelitian.....</i>	53
<i>Lampiran9 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi</i>	54
<i>Lampiran 10 Hasil Turnitin</i>	55
<i>Lampiran 11 Curriculum Vitae</i>	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut.

Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga Kelurahan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pohnomo No. 15 Tahun 2017 tentang bantuan keuangan khusus kelurahan tahun anggaran 2017 pasal 2 menyebutkan bahwa sumber dana bantuan Keuangan Kelurahan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohnomo dalam bentuk bantuan keuangan kepada kelurahan.

Masing-masing Kelurahan ini diberi wewenang/otonomi pengelolaan Anggaran sendiri, ini merupakan implementasi dari konsep Otonomi Daerah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam Peraturan Peraturan Bupati Pohnomo No. 15 Tahun 2017 tentang bantuan keuangan khusus kelurahan yang bersumber dari APBD, Bantuan Pemerintah dan Bantuan yang tidak mengikat,

maka Peneliti akan mengkhususkan penelitian ini hanya akan membahas mengenai dana Alokasi Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pohuwato atau yang disebut juga dengan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK). Hal ini dikarenakan dana Alokasi ini sudah pasti ada dalam setiap tahunnya, yang mana Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) ini digunakan untuk kebutuhan Operasional Perangkat Kelurahan dan berbagai Program serta Kegiatan dari Kelurahan itu sendiri.

Proses otonomi pengelolaan anggaran Kelurahan di mulai dari Rencana kerja yang dibuat oleh Kasi (Kepala Seksi) yang ada di Kelurahan dan isinya mencakup Musrenbang atau Musyawarah rencana pembangunan yang merupakan wadah bagi aspirasi dari lapisan elemen masyarakat seperti RT, RW, dan tokoh masyarakat serta mitra kerja yang berada dalam kawasan Kelurahan. Setelah disetujui dan ketok palu, maka disebut DPA atau Dana Pengguna Anggaran yang dapat di ambil di Badan Keuangan Daerah. Alokasi Dana Kelurahan menurut UU No.23 tahun 2014 menyebutkan bahwa 5% dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota ini di berikan untuk Kelurahan.

Dalam mengelola dan mengatur AAK ini, Perangkat Kelurahan diharuskan memenuhi beberapa prinsip yakni Trasnparansi, Akuntabilitas, Teknokratik, dan Partisipatif. Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh kemampuan Perangkat Kelurahan dalam mengelola AAK agar sesuai dengan maksud dan tujuan dari AAK itu sendiri. Pengelolaan atau Manajemen AAK ini sangat penting kaitannnya dengan jalannya berbagai program kegiatan Kelurahan. Berbeda dengan Alokasi Dana Desa, yang berdasarkan petunjuk teknis sudah ada

pembagian yang jelas. Sehingga seringkali, Skala Prioritas AAK ini digunakan untuk kepentingan yang lebih kearah pemberdayaan masyarakat bersifat fisik, seperti pembangunan infrastruktur bukan kearah memberdayakan masyarakat secara non fisik seperti pembinaan, penguatan dan pelatihan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul : ***“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Apakah Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato sudah efektif?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

1. Bagi pemerintah desa, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap manajemen keuangan desa.

2. Bagi praktisi, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka Efektivitas Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.
3. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan menambah kepustakaan di bidang manajemen keuangan desa berdasarkan penerapan yang ada dalam dunia nyata.
4. Bagi penulis sebagai pengaplikasian ilmu yang diperoleh dari perkuliahan dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kelurahan

2.1.1. Konsep Kelurahan

Menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Peraturan Peraturan Bupati Pohuwato No. 15 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa Kelurahan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pembentukan nama dan batas Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pembangunan Kelurahan adalah pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk merubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik. Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah Kecamatan didaerah Kabupaten/Kota, dapat berfungsi sebagai unit kerja pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat kepada Lurah. Sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah Kelurahan menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat dalam ruang lingkup Kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan Camat.

Sementara itu dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa :

1. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
2. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
3. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
 - a. Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
 - Masa kerja minimal 10 tahun.
 - Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Selain itu, Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota, selain dari padaitu lurah mempunyai tugas yakni pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2005 Lurah mempunyai tugas yakni :

- a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b) Pemberdayaan masyarakat;
- c) Pelayanan masyarakat;
- d) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f) Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

2.1.2. Pembentukan Kelurahan

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dilakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan harus diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati atau Walikota dan usul Lurah tersebut dimintakan persetujuan kepada DPRD dan setelah disetujui oleh DPRD, maka Bupati/Walikota menerbitkan peraturan daerah mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan.

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 tahun 2005, tentang pembentukan daerah Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan dibentuk diwilayah kecamatan.
2. Pembentukan Kelurahan dapat berupa penggabungan dari beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran Kelurahan dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih.

3. Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan:
 - a) Jumlah penduduk.
 - b) Luas wilayah.
 - c) Bagian wilayah kerja.
 - d) Sarana dan prasarana pemerintahan.
4. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.
5. Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

2.1.3. Tujuan Pembentukan

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan. Pembentukan Kelurahan-Kelurahan baru terutama dikota-kota dimana desa-desa yang telah ada sebelumnya sudah kurang selaras dan serasi dengan perkembangan masyarakatnya yang telah nyata mempunyai ciri dan sifat “masyarakat kota/urban”. Sebagai contoh desa-desa yang berada dikota kecamatan yang telah sedemikian rupa berkembang karena banyaknya industri dengan menggunakan teknologi tinggi dikawasan kecamatan tersebut, atau karena menjadi “simpul” lalu lintas perdagangan yang cukup padat dan lain sebagainya.

Adapaun syarat-syarat pembentukan kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor penduduk; sekurang-kurangnya 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga, dan sebanyak-banyaknya 20000 jiwa atau 4000 Kepala Keluarga.
- b. Faktor luas wilayah; harus dapat terjangkau secara efektif dalam melaksanakan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- c. Faktor letak; berkaitan dengan aspek komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat pengembangan harus sedemikian rupa, sehingga memudahkan pemberian pelayanan masyarakat.
- d. Faktor prasarana; berkaitan dengan prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan fisik pemerintah akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sebagaimana layaknya.
- e. Faktor sosial budaya, agama dan adat akan dapat berkembang dengan baik.
- f. Faktor kehidupan masyarakat; baik mata pencarian dan ciri-ciri kehidupan lainnya akan dapat meningkat menjadi lebih baik.

2.1.4. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2007 Pasal 11, Susunan organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat Kelurahan;
- b. Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional ;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah ;

- d. Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat ;
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.

2.2. Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK)

2.2.1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan dapat pula berarti Manajemen, karena Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, yang merupakan penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di artikan menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya:

Follet dalam Wijayanti (2008: 1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha paraanggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner dalam Wijayanti (2008: 1).

Gulick dalam Wijayanti (2008: 1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Schein (2008: 2) memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

G.R.Terry (2005: 1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen terdiri dari berbagai unsur, yakni *man, money, method, machine, market, material dan information*.

- a. *Man* : Sumber daya manusia;
- b. *Money*: Uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
- c. *Method* : Cara atau sistem untuk mencapai tujuan;

- d. *Machine* : Mesin atau alat untuk berproduksi;
- e. *Material* : Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan;
- f. *Market* : Pasaran atau tempat untuk melemparkan hasil produksi
- g. Information: Hal-hal yang dapat membantu untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer.

2.2.2. Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK)

Alokasi anggaran Kelurahan (AAK) merupakan dana yang berasal dari APBD daerah yang diberikan kepada Kelurahan dengan tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Pasal 9 menyebutkan bahwa :

1. Keuangan Kelurahan bersumber dari:
 - a) APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga
 - c) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya:

- a) Jumlah penduduk; kepadatan penduduk;
- b) Luas wilayah
- c) Kondisi geografis/karakteristik wilayah;
- d) Jenis dan volume pelayanan; dan
- e) Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Pasal 230 menyebutkan tentang Keuangan Kelurahan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- b. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK.

- e. Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan Kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah.

2.3. Prinsip Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK)

2.3.1 Transparanri

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002) dalam Krina (2003: 19), menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya.

Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan

sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Adapun Indikator Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme

yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah (Sedarmayanti, 2009:289).

Tabel 2.1.
Indikator Prinsip Transparansi

Dimensi	Indikator
Transparansi (<i>Transparency</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. • Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu. • Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. • Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Sumber: Sedarmayanti (2007:16-22)

2.3.2. Partisipasi

Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melalui wakil di Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan keterlibatan secara langsung. Partisipasi dalam arti

mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama member kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan (Sedarmayanti, 2009:290).

Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik, dalam mewujudkan kerangka yang cocok bagi partisipasi, perlu dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

- a. Partisipasi melalui institusi konstitusional (referendum, voting) dan jaringan *civil society* (inisiatif asosiasi);
- b. Partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan, *civil society* sebagai *service provider*;
- c. *Local culture* pemerintah (misalnya *Neighborhood Service Department* di USA, atau *Better Management Transparent Budget* di New Zealand);
- d. faktor-faktor lainnya, seperti transparansi, substansi proses terbuka dan konsentrasi pada kompetisi.

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Partisipasi berarti bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa partisipasi yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan

keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi hingga pengembangan atau perluasannya. Adapun indikator Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Tabel 2.2.
Indikator Prinsip Partisipasi

Dimensi	Indikator
Partisipasi (<i>Participation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses atau metode partisipatif. • Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah. • Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Sumber: Sedarmayanti (2007:16-22)

2.3.3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011: 89). Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009:289), akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk

pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (*stakeholder*).

Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan kerusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
 - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan;
 - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders;

- c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku;
 - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi;
 - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut;
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
- a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nir massa, maupun media komunikasi personal;
 - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program;
 - c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat;
 - d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan pemerintah mempunyai pengaruh (dampak) besar dan juga karena kegiatan pemerintah dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Adapun indikator Akuntabilitas

Tabel 2.3.

Indikator Prinsip Akuntabilitas

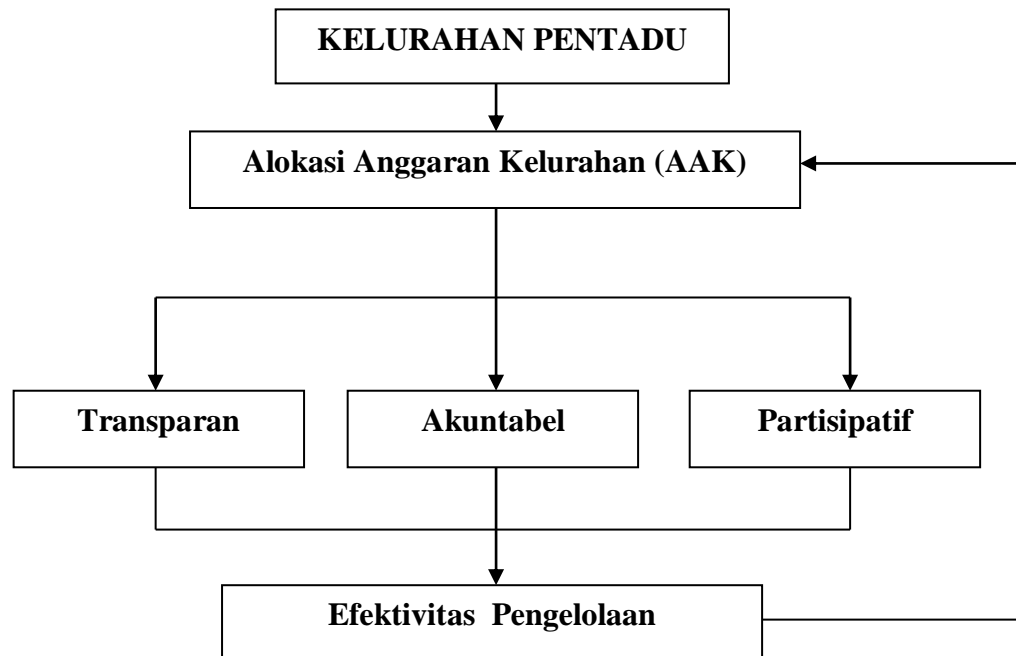
Dimensi	Indikator
Akuntabilitas (<i>Accoutability</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. • Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. • Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan. • Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah • Berkurangnya kasus-kasus KKN

Sumber: Sedarmayanti (2007:16-23)

2.4. Kerangka Pikir

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. Dalam konteks penelitian ini, Efektivitas pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK), Perangkat Kelurahan diharuskan memenuhi beberapa prinsip yakni Trasnparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif (Sedarmayanti, 2007:16-23).

Berdasarkan kajian teori di atas maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 2.1. : Skema Kerangka Pikir

2.5. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka pikir maka hipotesis penelitian ini adalah “Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato berjalan efektif”.

BAB III

OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

3.2. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sugiyono (2007:109). Digunakannya metode deskriptif dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menggambarkan suatu kegiatan Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan pendekatan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan melalui responden yang ada

di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato (Aparat Kelurahan secara keseluruhan serta tokoh masyarakat pada Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato) dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Nazir, 2014; 84). Memperhatikan pendapat Nazir, maka penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu perencanaan dan pelaksanaan:

1. Perencanaan

Perencanaan mencakup: identifikasi masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan perumusan masalah.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan mencakup: pengumpulan data (populasi, sampel dan pengembangan instrumen), pengujian instrumen, analisis data dan kesimpulan dan saran.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui

penggunaan pancaindra.. Teknik observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat seluruh kegiatan Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, serta mengamati secara langsung data-data yang diperlukan. Dengan demikian data yang didapat oleh penulis selama observasi berlangsung dapat menjadi masukan bagi penulisan usulan penelitian ini.

2. Teknik Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, responden pada wawancara ini merupakan yang memiliki keterkaitan langsung dengan Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.
3. Kuisioner, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

3.2.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Kelurahan secara keseluruhan serta tokoh masyarakat pada Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato yang berjumlah 30 orang responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh (*sensus*). Menurut Sugiyono (2004:44) *sampling* jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi kecil dan relatif heterogen.

3.2.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Singarimbun, 1995: 46). Definisi operasional merupakan petunjuk atau uraian dari konsep yang sudah ada dan dirumuskan ke dalam bentuk indikator-indikator bagaimana suatu variabel diukur dan lebih memudahkan operasionalisasi dalam suatu penelitian.

Tabel 3.1. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK)	1. Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. • Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu. • Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

persentase rata-rata menurut Sugiyono (2007:109). Untuk mencari rata-rata dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka persentase

F = Frekuensi (Jumlah responden) jawaban

N = *Number of cases* (jumlah responden)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

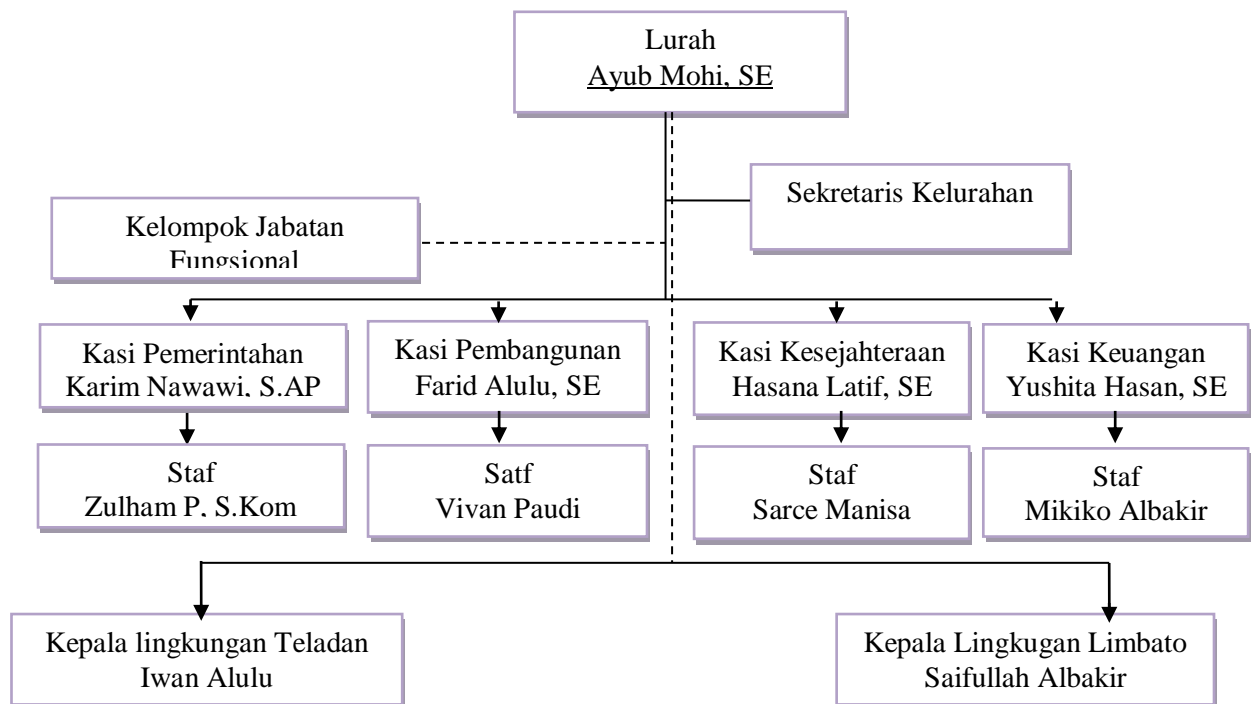
Kelurahan Pentadu adalah salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato yang mempunyai dua lingkungan, lingkungan Teladan dan lingkungan Limbato.

Adapun struktur pemerintahan kelurahan :

Lurah	: A Laparaga, S.Sos
Sekertaris Lurah	: Bayu Eka Septian S.STP
Kepala-Kapala Urusan (KAUR)	
Kepala Seksi Pemerintahan	: Ayub Mohi, SE
Kepala Seksi Pembangunan	: Farid Alulu, SE
Kepala Seksi Kesra & Umum	: Hasana Latif, SE
Kepala Seksi Keuangan	: Yusnita Hasan, SE
Kepala-Kepala Lingkungan	
Kepala Lingkungan Teladan	: Malino Kurune
Kepala Lingkungan Limbato	: Saipul Albakir

Adapun struktur organisasi pemerintahan kelurahan Pentadu di sajikan dalam bagan berikut :

Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pentadu.



4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato di lakukan dengan menggunakan metode persentasi

Skor terendah = Bobot terendah x Jumlah responden = $1 \times 1 \times 30 = 30$

Skor tertinggi = Bobot tertinggi x Jumlah responden = $5 \times 1 \times 30 = 150$

Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :

$$\text{Rentang Skala} = \frac{150 - 30}{5} = 24$$

Tabel 4.1.
Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden

Range	Kategori
130 – 154	Sangat Efektif
105 – 129	Efektif
80 – 104	Kurang Efektif
55 – 79	Tidak Efektif
30 – 54	Sangat Tidak Efektif

Sumber : Olahan Data 2021

Adapun tanggapan responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Tanggapan Responden Tentang Indikator Transparansi

Item	Frekwensi Indikator Transparan										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	16	53	12	40	2	7	0	0	0	0	134	SE
2	10	33	20	67	0	0	0	0	0	0	130	SE
3	15	50	15	50	0	0	0	0	0	0	135	SE
4	6	20	19	63	5	17	0	0	0	0	121	E
5	8	27	20	67	1	3	1	3	0	0	125	SE
Total Skor											645	E
Rata-Rata Skor											129	

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, diperoleh tanggapan responden sebanyak 16 responden atau 53% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 12 responden atau

40% yang menjawab efektif, sebanyak 2 responden atau 7% yang menjawab kurang efektif, sehingga total skor item 1 adalah 134.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu diperoleh tanggapan responden sebanyak 10 responden atau 33% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 20 responden atau 67% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 2 adalah 130.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan / kelurahan diperoleh tanggapan responden sebanyak 15 responden atau 50% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 15 responden atau 50% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 3 adalah 135.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah / kelurahan diperoleh tanggapan responden sebanyak 6 responden atau 20% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 19 responden atau 63% yang menjawab efektif, sebanyak 5 responden atau 17% yang menjawab kurang efektif, sehingga total skor item 4 adalah 121.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan, diperoleh tanggapan responden sebanyak 8 responden atau 27% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 20 responden atau 67% yang menjawab efektif, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab kurang efektif, sebanyak 1

responden atau 3% yang menjawab tidak efektif, sehingga total skor item 5 adalah 125.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel efektivitas pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang efektif pada indikator transparan yaitu rata-rata sebesar 129 dan masuk kategori efektif (E).

Tabel 4.3.
Tanggapan Responden Tentang Indikator Akuntabel

Item	Frekwensi Indikator Akuntabel										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	4	13	21	70	5	17	0	0	0	0	119	E
2	6	20	15	50	7	23	2	7	0	0	115	E
3	16	53	11	37	3	10	0	0	0	0	133	SE
4	15	50	12	40	3	10	0	0	0	0	132	SE
5	11	37	18	60	1	3	0	0	0	0	130	SE
Total Skor											629	E
Rata-Rata Skor											126	

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan diperoleh tanggapan responden sebanyak 4 responden atau 13% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 21 responden atau 70% yang menjawab efektif, sebanyak 5 atau 5% yang menjawab kurang efektif, sehingga total skor item 1 adalah 119.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan diperoleh tanggapan responden sebanyak 6 responden atau 20% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 15 responden atau 50% yang menjawab efektif, sebanyak 7 responden atau 23% yang menjawab kurang efektif, sebanyak 2 responden atau 7% yang menjawab tidak efektif, sehingga total skor item 2 adalah 115.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraannegara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 16 responden atau 53% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab efektif, sebanyak 3 responden atau 10% yang menjawab kurang efektif, sehingga total skor item 3 adalah 133.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah / kelurahan diperoleh tanggapan responden sebanyak 15 responden atau 50% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab efektif, sebanyak 3 responden atau 10% yang menjawab kurang efektif, sehingga total skor item 4 adalah 132.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang tidak terdapat kasus-kasus KKN diperoleh tanggapan responden sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 18 responden atau 60% yang menjawab efektif, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab kurang efektif, sehingga total skor item 5 adalah 130.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel efektivitas pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang efektif pada indikator akuntabel yaitu rata-rata sebesar 126 dan masuk kategori efektif (E).

Tabel 4.4.
Tanggapan Responden Tentang Indikator Partisipasi

Item	Frekwensi Indikator Partisipasi										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	5	19	22	85	3	12	0	0	0	0	122	E
2	5	19	23	88	1	4	1	4	0	0	122	E
3	12	46	17	65	1	4	0	0	0	0	131	SE
4	9	35	21	81	0	0	0	0	0	0	131	SE
Total Skor											506	E
Rata-Rata Skor											127	

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses atau metode partisipatif diperoleh tanggapan responden sebanyak 5 responden atau 19% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 22 responden atau 85% yang menjawab efektif, sebanyak 3 responden atau 12% yang menjawab kurang efektif, sehingga total skor item 1 adalah 122.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama diperoleh tanggapan responden sebanyak 5 responden atau 19% yang menjawab sangat efektif,

sebanyak 23 responden atau 85% yang menjawab efektif, sebanyak 1 responden atau 4% yang menjawab kurang efektif, sebanyak 1 responden atau 4% yang menjawab tidak efektif, sehingga total skor item 2 adalah 122.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan kelurahan diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 46% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 17 responden atau 65% yang menjawab efektif, sebanyak 1 responden atau 4% yang menjawab kurang efektif, sehingga total skor item 3 adalah 131.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah / kelurahan diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 35% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 21 responden atau 81% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 4 adalah 131.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel efektivitas pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang efektif pada indikator partisipasi yaitu rata-rata sebesar 127 dan masuk kategori efektif (E).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, Hasil olahan data dapat diperoleh rata-rata responden memiliki tanggapan yang efektif, yaitu pada indikator transparan diperoleh hasil rata-rata sebesar 129 dan masuk kategori efektif, indikator akuntabel diperoleh hasil sebesar 126 dan masuk kategori efektif sedangkan indikator partisipasi diperoleh hasil rata-rata sebesar 127 dan masuk kategori efektif. Dengan demikian efektivitas pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Sudah Berjalan Efektif.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyajikan saran-saran sebagai masukan bagi pihak Pemerintah Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato yaitu sebagai berikut:

1. Agar kiranya pihak Pemerintah Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato meningkatkan pengelolaan pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan agar menjadi lebih efektif kedepannya.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti atau menambahkan lebih banyak item-item pernyataan yang terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Nasional & Departemen Dalam Negeri. 2002. Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah. Jakarta : BPN dan Depdagri.
- M. Iqbal Hasan, M.M., 2005, “Pokok - Pokok Materi Statistik 2 “, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ketiga.
- Krina L.P.L. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Nazir, Moh. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Bupati (PERBUP) Pohuwato No. 15 Tahun 2017 tentang Kelurahan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- Sedarmayanti. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: RefikaAditama.
- Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelititan Survei. LP3S, Jakarta.
- Sugiyono. 2007. “Statitiska Untuk Penelitian” . Bandung : CV. ALFABETA.
- _____. 2004. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George, 2005, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: PT, Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Wijayanti, W. A. 2008. Pengelolaan Tanaman Tebu (*Saccharum Officinarum* L.) di, Pabrik Gula Tjoekir Ptpn X, Jombang, Jawa Timur. (Skripsi). Institut Pertanian Bogor. Bogor.

JADWAL PENELITIAN

[illegible][illegible]

Lampiran 2**KUISIONER**

Dalam rangka penyusunan skripsi mengenai “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato*”. Maka penulis memohon bantuan Bapak/ Ibu / Saudara/ I untuk meluangkan sedikit waktu mengisi daftar pertanyaan di bawah ini. Mengenai identitas Bapak/ Ibu/ Saudara/ I kami jamin kerahasiaannya.

Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/I berikan.

Hormat Saya,

Rohana Hakim
NIM E2119235

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Pilihlah pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda tersebut adalah :

5	Sangat Efektif	(SE)
4	Efektif	(E)
3	Kurang Efektif	(KE)
2	Tidak Efektif	(TE)
1	Sangat Tidak Efektif	(STE)

KUISIONER EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (AAK)

No	Pernyataan	SE	E	KE	TE	STE
1	Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik					
2	Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu					
3	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan / kelurahan					
4	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah / kelurahan					
5	Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan					
6	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan					
7	Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan					
8	Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan					

9	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah / kelurahan					
10	Tidak terdapat kasus-kasus KKN					
11	Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses atau metode partisipatif					
12	Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama					
13	Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan kelurahan					
14	Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah / kelurahan					

Lampiran 3

TABULASI DATA

Z	EFEKTIVITAS PENGELOLAAN AAK														Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	5	5	4	3	4	4	3	5	4	5	4	4	4	5	59
2	5	5	4	3	4	4	3	5	4	5	4	4	4	5	59
3	5	5	4	3	4	4	3	5	4	5	4	4	4	5	59
4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	59
5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	59
6	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	64
7	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	65
8	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3	4	4	61
9	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	62
10	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	61
11	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	59
12	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	59
13	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	60
14	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	3	4	5	4	63
15	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	2	5	4	62
16	4	4	4	4	4	4	3	4	3	5	4	4	5	4	56
17	4	4	4	4	4	4	3	5	3	5	4	4	5	5	58
18	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	59
19	4	4	5	5	4	4	2	4	4	5	5	5	4	4	59
20	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	59
21	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	59
22	3	4	4	4	5	3	4	3	5	4	3	4	5	4	55
23	3	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	60
24	5	5	5	5	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	55
25	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	60
26	5	4	4	3	4	3	2	3	4	4	4	4	5	5	54
27	5	4	4	4	2	3	5	4	5	4	4	5	4	4	57
28	5	4	5	4	3	3	4	4	4	5	4	4	5	4	58
29	5	4	5	5	5	5	3	4	3	3	4	4	4	5	59
30	4	5	4	3	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	59

Lampiran 4

FREQUENCY

Statistics

	AAK	AAK. 1	AAK. 2	AAK. 3	AAK. 4	AAK. 5	AAK. 6	AAK. 7	AAK. 8	AAK. 9	AAK. 10	AAK. 11	AAK. 12	AAK. 13	AAK. 14
N Valid	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	1778	134	130	135	121	125	119	115	133	132	130	122	122	131	129

Frequency Table

Alokasi Anggaran Kelurahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	54	1	3.3	3.3	3.3
	55	2	6.7	6.7	10.0
	56	1	3.3	3.3	13.3
	57	1	3.3	3.3	16.7
	58	2	6.7	6.7	23.3
	59	13	43.3	43.3	66.7
	60	3	10.0	10.0	76.7
	61	2	6.7	6.7	83.3
	62	2	6.7	6.7	90.0
	63	1	3.3	3.3	93.3
	64	1	3.3	3.3	96.7
	65	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

AAK.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	6.7	6.7	6.7
	4	12	40.0	40.0	46.7
	5	16	53.3	53.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

AAK.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	20	66.7	66.7	66.7
	5	10	33.3	33.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

AAK.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	15	50.0	50.0	50.0
	5	15	50.0	50.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

AAK.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	5	16.7	16.7	16.7
	4	19	63.3	63.3	80.0
	5	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

AAK.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	3.3	3.3	3.3
	3	1	3.3	3.3	6.7
	4	20	66.7	66.7	73.3
	5	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

AAK.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	5	16.7	16.7	16.7
	4	21	70.0	70.0	86.7
	5	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

AAK.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	6.7	6.7	6.7
	3	7	23.3	23.3	30.0
	4	15	50.0	50.0	80.0
	5	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

AAK.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	3	10.0	10.0	10.0
	4	11	36.7	36.7	46.7
	5	16	53.3	53.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

AAK.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	3	10.0	10.0	10.0
	4	12	40.0	40.0	50.0
	5	15	50.0	50.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

AAK.11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	3	10.0	10.0	10.0
	4	22	73.3	73.3	83.3
	5	5	16.7	16.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

AAK.12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	3.3	3.3	3.3
	3	1	3.3	3.3	6.7
	4	23	76.7	76.7	83.3
	5	5	16.7	16.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

AAK.13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	3.3	3.3	3.3
	4	17	56.7	56.7	60.0
	5	12	40.0	40.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

AAK.14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	21	70.0	70.0	70.0
	5	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 5

OUTPUT PENELITIAN


Item	Frekwensi Indikator Transparan										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	16	53	12	40	2	7	0	0	0	0	134	SE
2	10	33	20	67	0	0	0	0	0	0	130	SE
3	15	50	15	50	0	0	0	0	0	0	135	SE
4	6	20	19	63	5	17	0	0	0	0	121	E
5	8	27	20	67	1	3	1	3	0	0	125	SE
Total Skor											645	E
Rata-Rata Skor											129	

Item	Frekwensi Indikator Akuntabel										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	4	13	21	70	5	17	0	0	0	0	119	E
2	6	20	15	50	7	23	2	7	0	0	115	E
3	16	53	11	37	3	10	0	0	0	0	133	SE
4	15	50	12	40	3	10	0	0	0	0	132	SE
5	11	37	18	60	1	3	0	0	0	0	130	SE
Total Skor											629	E
Rata-Rata Skor											126	

Item	Frekwensi Indikator Partisipasi										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	5	19	22	85	3	12	0	0	0	0	122	E
2	5	19	23	88	1	4	1	4	0	0	122	E
3	12	46	17	65	1	4	0	0	0	0	131	SE
4	9	35	21	81	0	0	0	0	0	0	131	SE
Total Skor											506	E
Rata-Rata Skor											127	

Lampiran 6

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

 **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
 Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
 Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

No.: 19177/PIP/LEMLIT-UNISAN/VII/2021


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulham, Ph.D
 NIDN : 0911108104
 Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:


Nama Mahasiswa : Rohana Hakim
 NIM : E2119235
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Manajemen
 Lokasi Penelitian : Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato
 Judul penelitian : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 02 Juli 2021
 Ketua,

Zulham, Ph.D
 NIDN : 0911108104

Lampiran 7

SURAT BALASAN PENELITIAN


PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
KECAMATAN PAGUAT
KELURAHAN PENTADU
Alamat: Jl. Trans Sulawesi Paguat

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 474/Klp-Pgt/ 343 /VII/2021


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato menerangkan bahwa :

Nama	: ROHANA HAKIM
Nim	: E2119235
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan/Prodi	: Manajemen
Lokasi Penelitian	: Lingkungan Teladan Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato
Judul Penelitian	: Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana-dana Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato

Berdasarkan Surat Nomor 091/PRODI-MJ/LEMLIT-UNISAN/V/2021 tentang Izin pengambilan data dalam Rangka penyusunan Proposal/Skripsi di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat untuk Kelengkapan Studi dari Mahasiswi **Universitas Ichsan Gorontalo**, Bahwa benar telah selesai melaksanakan Penelitian di Kelurahan Pentadu. dan Pemerintah Kelurahan Pentadu telah memberikan Data dan Informasi yang sesuai dengan Data yang dibutuhkan oleh Mahasiswi yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.


Pentadu, 12 Juli 2021


AYUB MOHL, SE

Scanned by TapScanner

Lampiran 8

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 0984/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN	: 0906058301
Unit Kerja	: Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo


Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw	: ROHANA HAKIM
NIM	: E2119235
Program Studi	: Manajemen (S1)
Fakultas	: Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi	: Efektivitas pengelolaan alokasi anggaran kelurahan (AAK) di kelurahan pentadu kecamatan paguat kabupaten pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 27 November 2021
Tim Verifikasi,


Sunarto Taliki, M.Kom
 NIDN. 0906058301

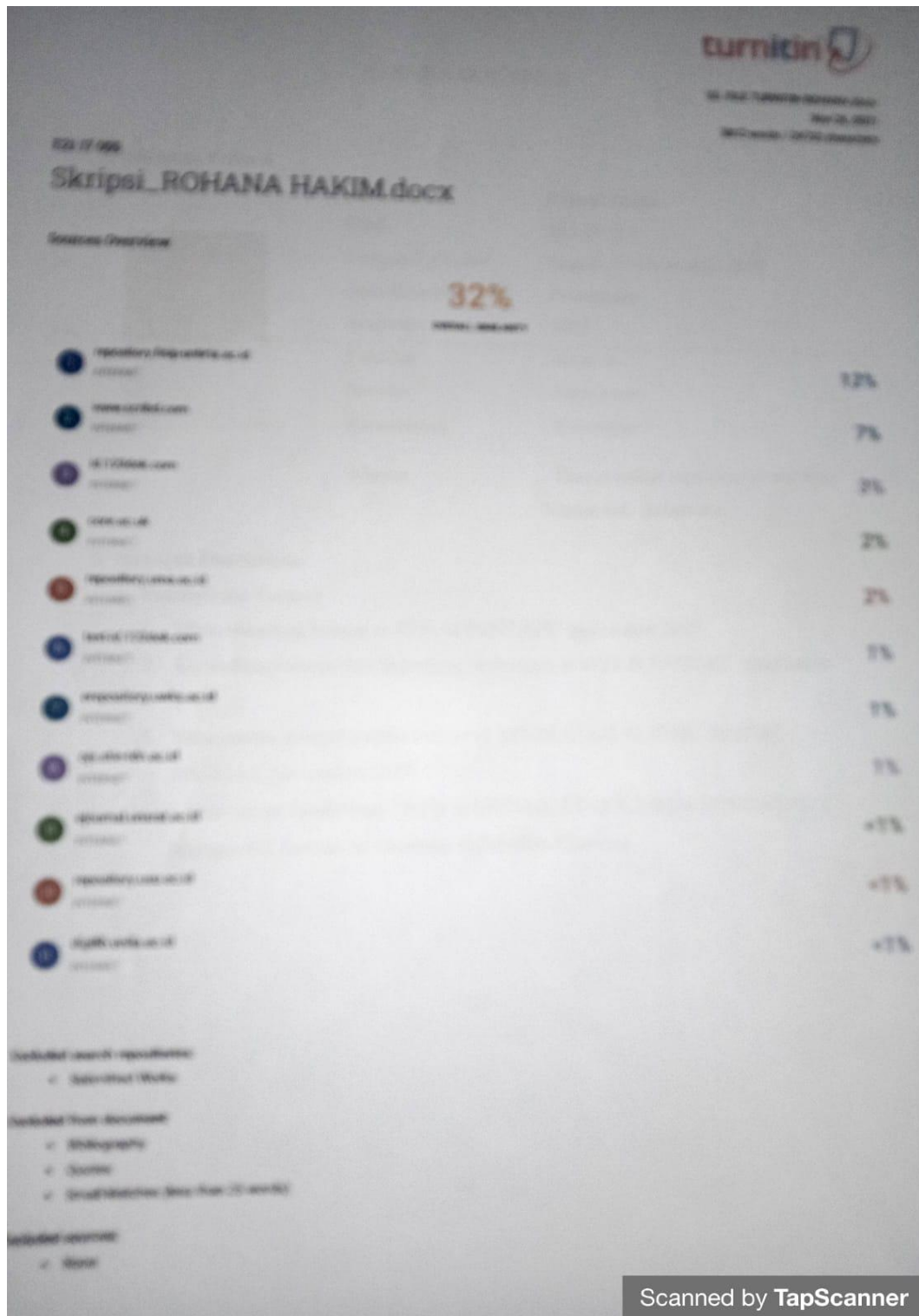
Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Scanned by TapScanner

Lampiran 9

HASIL TURNITIN



Lampiran 10

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi



Nama	: Rohana hakim
NIM	: E21.19.235
Tempat/Tgl Lahir	: Paguat, 29-November-1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Angkatan	: 2019
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Manajemen
Konsentrasi	: Keuangan
Alamat	: Dusun mekar jaya desa teratai kec. Marisa kab. pohuwato

2. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. Menyelesaikan belajar di SDN 02 PENTADU pada tahun 2013
2. Kemudian melanjutkan kejenjang berikutnya di MTS N PAGUAT pada tahun 2015
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di MADRASAH ALIYAH NEGERI PAGUAT, pada tahun 2017
4. Melanjutkan Pendidikan Tinggi di UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO, Mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi.